

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
1975-1998 DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH¹**

Oleh:

Subekty Wibowo²

Hermanu Joebagio, Saiful Bachri³

Abstract

The purpose of this research were to describe: (1) the background of the establishment of Ulama Council of Indonesia; (2) the role and position of Ulama Council of Indonesia; (3) the role of Ulama Council in established the Islamic discource in Indonesian New Order 1975-1998; (4) the role of Ulama Council in established the Islamic discource in Indonesias New Order 1975-1998 and its relevance in historical learning at class XII of senior high school.

This research used historical method, there are four phases of research procedure, and they are heuristics, critics, interpretations, and historiography. Technique of analyzing the data used historical analysis, give priority to criticism sharpness and data interpretation. The source of this research used primary resource and secondary resource.

The result of this research are: (1) MUI was established by New Order government to muffle the conflict and to create a harmony and cooperations among Muslims and government (2) MUI developed a mainstream religious discources with their authority to created fatawas (3) Reviewing MUI's history in Indonesias New Order and it's fatawas about religious sect which can be used as relevant course to look for new paradigm to create a harmony in Indonesian plural society.

Keyword: ulama, diversity, pluralism

¹ Rangkuman Penelitian Skripsi

² Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

³ Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang pendirian Majelis Ulama Indonesia; (2) peran dan kedudukan Majelis Ulama Indonesia; (3) peran Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan wacana keislaman pada masa Orde Baru 1975-1998; (4) peran Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan wacana keislaman pada masa Orde Baru 1975-1998 dan relevansinya dengan pembelajaran sejarah kelas XII IPS

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari empat tahapan prosedur penelitian, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis sejarah yang mengutamakan ketajaman interpretasi data sejarah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) MUI dibentuk oleh pemerintah Orde Baru untuk meredam pertentangan kelompok dan menciptakan harmoni dan kerjasama dalam hubungan antara umat Islam dan negara (2) Melalui fatwa dan otoritas yang dimiliki, MUI menumbuhkan diskursus-diskursus baru yakni keberagaman arus utama (3) Mengkaji ulang sejarah MUI pada masa Orde Baru dan substansi mengenai fatwanya tentang paham keagamaan dapat menjadi pelajaran yang relevan untuk mencari cara pandang baru untuk menciptakan hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Kata Kunci: ulama, keberagaman, pluralisme

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan institusi bentukan pemerintah Orde Baru yang berfungsi sebagai saluran komunikasi alternatif umat Islam dengan pemerintah (Porter, 2002; Bruinessen 2013) selain melalui partai politik. Institusi ini menghimpun berbagai lapisan umat Islam seperti ulama, *umara* (pemerintah), *zu'ama* (cendekiawan dan tenaga ahli), organisasi dan lembaga Islam, serta perempuan dan pemuda sebagai representasi suara umat Islam.

MUI terbentuk pada tanggal 26 Juli 1975 melalui sebuah Mukhtamar Nasional Ulama di Jakarta. Mukhtamar tersebut dibuka langsung oleh Presiden Soeharto. Pembentukan MUI merupakan tanda bahwa pemerintah menaruh perhatian yang besar pada sektor agama terutama Islam. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia yakni 87,51% atau 103,57 juta jiwa menurut sensus penduduk tahun 1971 (Mujiburrahman, 2006). Besarnya prosentase penduduk Muslim merupakan potensi yang harus dikelola dengan benar untuk mendukung laju pemerintahan.

Sebagai lembaga korporatis, MUI dilarang terlibat dalam bidang politik praktis dan tidak diperkenankan pula terlibat dalam kepentingan praktis (Noer, 1978; Thaba). Tugas MUI ialah sebatas memberi fatwa, nasihat maupun seruan moral kepada pemerintah maupun kepada umat Islam baik masalah agama atau masalah bangsa pada umumnya. Oleh karena itu, MUI lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan seruan fatwa-fatwanya.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sifatnya otoritatif (Ricklefs, 2013). MUI tidak memiliki kedudukan konstitusional dalam ketatanegaraan Indonesia tetapi diperlakukan seolah merupakan badan legislatif. Ricklefs menilai bahwa MUI cukup diperhitungkan dalam kalkulasi politik Indonesia setidaknya sebagai representasi wakil umat Islam di Indonesia. Supremasi fatwa maupun kedudukannya di tengah umat Islam menarik relasi MUI dengan agenda politik nasional dan pembentukan wacana keislaman yang luas di kalangan umat Islam Indonesia.

Sejarah MUI dikaji sejak masa berdirinya pada tahun 1975 sampai dengan masa tumbanganya Orde Baru pada tahun 1998. Dalam jangka waktu ini MUI telah menjalankan perannya sebagai penyalur aspirasi umat Islam, penjaga ortodoksi Islam dan mengarungi realitas sosial dan politik dengan segala pergumulannya dengan rezim opresif dan otoriter Orde Baru.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk merekonstruksi peran Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan wacana keislaman pada masa Orde Baru 1975-1998 dan relevansinya dengan Pembelajaran Sejarah kelas XII IPS. Mengingat peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode historis (sejarah). Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti – bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat .

Penelitian historis tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Adapun beberapa sumber data yang dipergunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, sumber Primer. Dalam penelitian ini, digunakan sumber primer tertulis. Sumber tertulis primer berupa dokumen meliputi Kumpulan fatwa MUI sejak 1975 yang telah dibukukan, keputusan-keputusan MUI, publikasi-publikasi resmi MUI melalui majalah Mimbar Ulama, pidato maupun amanat Presiden Soeharto dalam perayaan hari besar agama Islam. *Kedua*, Sumber Sekunder Sumber sekunder penelitian ini penulis menyajikan sumber dari studi pustaka terutama yang berasal dari hasil penelitian tentang MUI dari berbagai aspek baik berupa buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, maupun makalah.

Berdasarkan sumber data yang ditetapkan, maka dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca buku – buku literatur majalah, surat kabar , dan hasil penelitian skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah.

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis historis. Analisis data historis lebih dikenal dengan penafsiran atau interpretasi sejarah. Interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah (Abdurrahman, 2007). Teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah (Syamsuddin, 1994). Analisis dilakukan dengan meneliti semua bahan yang dipakai, setelah identitasnya dapat dibuktikan asli, baru dapat diteliti apakah pernyataan, fakta dan ceritanya dapat dipercaya.

Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori disusunlah fakta kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Analisis sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis (Kartodirdjo, 1992). Data yang telah diperoleh diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian.

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah historiografi merupakan sajian karya sejarah dari hasil penelitian, dipaparkan dengan bahasa ilmiah dan seni yang khas. Dalam historiografi disampaikan hasil sintesa fakta-fakta yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah. Dalam tahap ini peneliti merangkai fakta-fakta sejarah menjadi sebuah kisah sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. Historiografi menjelaskan apa yang ditemukan beserta argumentasinya secara sistematis, sehingga dalam penelitian ini diperoleh suatu penulisan sejarah yang menarik dengan judul, "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan wacana keislaman pada masa Orde Baru 1975-1998 dan relevansinya dengan Pembelajaran Sejarah kelas XII IPS".

PEMBAHASAN

1. Orde Baru dan Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Orde Baru lahir melalui kemelut politik Gerakan 30 September 1965 yang ditandai dengan munculnya Soeharto dalam politik nasional. Soeharto

terlewatkan dari daftar penculikan dalam Gerakan 30 September, walaupun dikategorikan sebagai perwira tinggi. Kondisi ini taktis menyisakan Soeharto sebagai perwira tertinggi yang dapat mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan langkah tersebut dilakukannya manakala mendengar Ahmad Yani menghilang (Crouch, 1999).

Segera setelah mengambil alih komando Angkatan Darat, Suharto dan Pimpinan Angkatan Darat berusaha membangkitkan sentimen kebencian terhadap PKI dan menggalang dukungan untuk memberantasnya. Pimpinan Angkatan darat melalui Brigadir Jenderal Sucipto mengumpulkan partai-partai dan kelompok-kelompok antikomunis untuk membentuk suatu front guna menuntut diambilnya tindakan pada PKI (Crouch, 1999; Elson, 2005). Selain itu, atas saran Ali Moertopo, Angkatan Darat memulai propaganda anti PKI sebagai sebagai kejahatan yang tak terampuni dengan produksi kata Gerakan 30 September sebagai “Gestapu”, yang walaupun janggal untuk sebuah akronim namun sangat familiar dan efektif bagi gerakan (Elson, 2005). Gestapu adalah kata tersebut diadaptasi dari literatur organisasi teror yang dibentuk Hitler yakni *Gestapo* (Brackman, 1970).

Status darurat perang ditetapkan atas wilayah Jakarta dan kemudian diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Unit-unit Angkatan Darat menyapu daerah-daerah basis komunis di Ibukota serta menahan kader PKI. Dalam operasi tersebut masyarakat dilibatkan dalam menunjukkan rumah para kader PKI. Pelibatan masyarakat dalam pembersihan PKI menimbulkan gesekan horizontal dalam masyarakat bahkan mencapai kulminasi hingga pembantaian massal kader PKI di berbagai wilayah di Indonesia.

Orde Baru mewarisi kekacauan politik dan krisis ekonomi Orde Lama. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah Orde Baru adalah inflasi yang membumbung tinggi, defisit neraca pembayaran, terkurasnya cadangan devisa dan kesulitan membayar hutang luar negeri. Perbaikan ekonomi menjadi prioritas dalam masa awal Orde Baru. Kegiatan ekonomi politik, yakni hubungan antara penciptaan strategi ekonomi “berorientasi ke

luar” dengan pembentukan suatu sistem politik yang mendukung kebijaksanaan ekonomi (Masoed, 1989).

Untuk menciptakan stabilitas dan iklim politik yang mendukung pemerintah menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Ideologi ini menjembatani konflik ideologi yang menjangkit partai-partai politik. Aspek pembangunan mencakup upaya perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, slogan yang sering digaungkan adalah pembangunan yang diidentikkan dengan sektor ekonomi menjadi panglima. Semangat pembangunan sejalan dengan ideologi Angkatan Darat, sehingga ideologi Angkatan Darat berkembang menjadi ideologi negara (Briton, 1996). Doktrin Dwi Fungsi ABRI yang dicetuskan oleh A. H. Nasution menjadi legitimasi perlunya peran sosial politik kaum militer.

Pemerintah membina membina sistem politik yang tertib dan terkendali untuk mendukung program pembangunan. Langkah pertama adalah membentuk konsensus nasional mengenai kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan merestrukturisasi sistem politik. Program restrukturisasi politik Orde Baru mencakup empat hal penyederhanaan sistem kepartaian, *floating mass* dan monoloyalitas, pembentukan lembaga korporatis, dan penerapan asas tunggal Pancasila (Masoed, 1989; Syukur, 2012).

Gagasan pembentukan Majelis Ulama tingkat nasional pada awalnya ditanggapi secara apriori oleh umat Islam. Majelis Ulama tingkat nasional dinilai sebagai upaya pengebirian kaum ulama dan kekhawatiran lembaga tersebut akan digunakan pemerintah sebagai alat untuk membatasi gerak umat Islam (Mudzar, 1993). Kekhawatiran ulama tersebut bukan tanpa alasan mengingat bahwa hubungan politik Islam dan Orde Baru sebagaimana dalam pandangan Robert Hefner merupakan sebuah koalisi yang ambivalen. Kerjasama dan dukungan-dukungan yang terbina sejak Orde Baru tersebut terbentuk tidak menghilangkan sikap perlawanan rezim terhadap otonomi politik umat Islam. Faktor historis resistensi kekuatan politik umat Islam pada masa lalu baik dalam DI/TII maupun PRRI tidak begitu saja dilupakan dan

cenderung membentuk trauma politik yang membayangi pemerintah Orde Baru. Tidak mengherankan apabila Orde Baru menetapkan kewaspadaan bukan hanya kekuatan ekstrem kiri melainkan juga kekuatan ekstrem kanan yang merujuk pada setiap bentuk radikalisme yang latarbelakangi faktor agama. Oleh karena rapuhnya hubungan tersebut, Orde Baru tidak memiliki *master plan* tentang Islam sehingga dalam praktik politik Orde Baru mengeras terhadap rekan koalisinya (Hefner, 2001).

Menurut Muhammad Atho Mudzhar ada tiga peristiwa politik penting yang menimbulkan resistensi antara ulama dengan pemerintah sehingga ulama menolak pembentukan MUI. *Pertama*, pemilihan umum 1971 dengan lahirnya Sekber Golkar yang bersifat sekuler dan kemunduran peranan partai politik Islam dalam kontestasi politik nasional. *Kedua*, pengurangan jumlah partai-partai politik Islam. Fusi partai politik secara kualitatif berimbas pada menyusutnya saluran aspirasi politik umat Islam. *Ketiga*, diajukannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum Islam mengenai perkawinan.

Kemunduran Islam politik dalam kontestasi politik pada akhirnya ikut andil dalam mendorong terciptanya iklim politik yang lebih kompromis di antara elit Muslim dalam membentuk MUI. Hal ini dapat ditelusuri dari pengungkapan Hamka tentang kesediaannya menjadi Ketua MUI. Hamka mengungkapkan terdapat kepentingan mendesak dari kalangan umat Islam yang tak dapat dihindarkan lagi (Rusydi, 1981; Mudzar, 1993). *Pertama*, untuk menghadapi ideologi komunis di Indonesia haruslah menggunakan ideologi yang lebih kuat yakni Islam, agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Wacana antikomunis tersebut bukanlah tanpa alasan. Hamka khawatir dengan perkembangan politik dunia terutama kekalahan Amerika Serikat dalam membendung Komunisme di Vietnam akan turut menyebarluaskan kembali komunisme hingga ke Indonesia, sehingga kolaborasi dengan pemerintah dalam menegakkan ketahanan nasional sangat diperlukan. *Kedua*, untuk memperbaiki hubungan umat Islam dengan

pemerintah. Menurut Hamka pemerintah senantiasa bersikap tidak dipercaya terhadap umat Islam sehingga selalu dicurigai betapapun yang dilakukan adalah kebaikan. Pada saat yang sama umat Islam bersikap apriori pada tiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk perbaikan nasib rakyat bahkan cenderung menganggap sebagai kebijakan sekuler dan memiliki agenda tertentu. Umat Islam selalu kehilangan kesempatan untuk pertimbangan setiap kebijakan dari pemerintah.

Pemerintah Orde Baru jelas merupakan pihak yang berperan aktif. Instruksi pembentukan Majelis-Mejelis Ulama tingkat daerah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada bulan Mei 1975 dan sebagai tindak lanjut Lokakarya *Muballigh* seluruh Indonesia, pemerintah mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat nasional pada tanggal 1 Juli 1975. Empat orang bertindak dalam panitia tersebut, yakni H. Sudirman, Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), K.H. Abdullah Syafii, dan K.H. Syukri Ghazali. Pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 Musyawarah Nasional (Munas) I Majelis Ulama diselenggarakan. Pada akhir Munas MUI dideklarasikan dan Hamka terpilih sebagai ketua umum MUI yang pertama.

Sewaktu menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia pada tanggal 24 Mei 1975 Presiden Soeharto mengemukakan dua alasan penting pembentukan MUI yakni keinginan pemerintah agar umat Islam bersatu dan kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan ulama (Mudzar, 1993). Dengan kata lain pemerintah memiliki kepentingan agar ulama dan umat Islam secara umum turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan. Besarnya prosentase pemeluk agama Islam penduduk Indonesia yang mencapai 87,51% atau 103,57 juta jiwa menurut sensus penduduk tahun 1971 (Mujiburrahman, 2006) merupakan sebuah potensi besar sebagai modal pembangunan dan juga potensi konflik yang besar apabila tidak dikelola dengan benar.

2. Peran dan kedudukan Majelis Ulama Indonesia

Sebagaimana arahan Presiden Soeharto pada pidato pembentukannya, MUI dilarang terlibat dalam bidang politik praktis dan tidak diperkenankan pula terlibat dalam kepentingan praktis (Noer, 1978; Thaba, 1996). Tugas MUI ialah sebatas memberi fatwa, nasihat maupun seruan moral kepada pemerintah maupun kepada umat Islam baik masalah agama atau masalah bangsa pada umumnya. MUI juga berperan sebagai penghubung yang menjembatani nilai agama yang sifatnya etis dan program-program pembangunan pada tataran praktis. Peran ini relevan dengan tesis Geertz tentang *cultural broker* atau pialang budaya ketika menyangkut partisipasi ulama dalam sosialisasi program pemerintah kepada umat (Suprayogo, 2007).

Badan penghubung terpenting antara MUI dan pemerintah adalah Departemen Agama selaku pengurus persoalan yang berkaitan dengan aspek agama. Departemen Agama menyediakan bantuan keuangan untuk operasional kegiatan-kegiatan MUI sekaligus penghubung antara MUI dengan Presiden. Tidak mengherankan apabila MUI dijuluki sebagai lembaga semipemerintah apabila ditinjau dari hubungan patronase ini.

Operasional MUI berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau dalam istilah MUI disebut Pedoman Pokok dan Pedoman Rumah Tangga. MUI membentuk struktur organisasi, susunan pengurus dan program kerja. Berdasarkan Pedoman Pokok dan Pedoman Rumah Tangga tahun 1976 kepengurusan MUI terdiri dari Pelindung, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan. Pelindungnya dijabat oleh Presiden RI, Dewan Pertimbangan dijabat oleh Menteri Agama dan Ketua Umum Dewan Pimpinan yang pertama dijabat oleh Buya Hamka. MUI telah beberapa kali melaksanakan musyawarah nasional dan beberapa kali memilih ketua umum sejak periode berdirinya hingga runtuhnya Orde Baru. Buya Hamka terpilih sebagai ketua Umum MUI yang pertama hingga berakhirnya periode tahun 1980 dan kemudian terpilih kembali untuk periode yang kedua. Buya Hamka mengundurkan diri sebagai Ketua Umum MUI akibat polemik terkait fatwa MUI tentang perayaan natal yang membuatnya dengan pemerintah Orde Baru renggang. Sepeninggal Hamka kepemimpinan MUI dijalankan oleh

K. H. Syukri Ghazali. Hubungan yang harmonis antara MUI dan pemerintah memuluskan proses suksesi kepemimpinan MUI untuk periode-periode selanjutnya yakni K. H. Hasan Basri dan K. H. Ali Yafie

Pada awal berdirinya MUI berkantor di salah satu ruangan Masjid Al Azhar, dibangun kantor di kompleks tersebut atas bantuan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Gubernur DKI Jakarta. Setelah Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Soeharto, MUI mendapat ruangan sebagai kantor di kompleks masjid Istiqlal. MUI memiliki lima komisi yakni Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Isamiyah, Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama, Komisi Kerjasama Ulama Umara dan Komisi Umum.

3. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pembentukan Wacana Islam pada Masa Orde Baru

Fatwa MUI merupakan hasil dari seperangkat keadaan sosial politik oleh karena sifatnya yang dinamis. Fatwa yang ditetapkan MUI acap kali merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa. Menurut Muhammad Atho Mudzar (1993) terdapat tiga faktor yang turut mempengaruhi suatu fatwa, yakni: *Pertama*, adanya kecenderungan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Fatwa tentang peternakan kodok, peternakan kelinci, pemotongan hewan dengan mesin keluarga berencana dan fatwa penetapan bandara King Abdul Aziz sebagai lokasi *miqat* menunjukkan dukungan fatwa-fatwa tersebut terhadap kebijakan pemerintah. *Kedua*, keinginan menjawab tantangan zaman modern. Fatwa-fatwa dunia kedokteran seperti sumbangan kornea mata dan pencakokan jantung adalah tanggapan terhadap perkembangan modern dunia kedokteran. *Ketiga*, berkaitan dengan hubungan antaragama. Sejalan dengan Muzhar, M. B. Hooker (1997) mengungkapkan peran utama MUI sejak periode berdirinya pada tahun 1975-1990 adalah untuk mendukung dan pada beberapa kasus melegitimasi kebijakan dan program pemerintah beberapa fatwa. Dorongan untuk mendukung kebijakan pemerintah lebih besar ketimbang keperluan umum.

Dalam konteks negara Orde Baru fatwa MUI memang hampir selalu didukung pemerintah. Pemerintah memperlakukan MUI sebagai lembaga seminegara dan representasi umat Islam kendati para pengurusnya tidak merepresentasikan keseluruhan umat Islam. Posisi ini menguntungkan MUI karena seluruh pandangan keagamaannya dapat diklaim sebagai suara resmi pemerintah sekaligus suara umat Islam Indonesia.

MUI memanfaatkan fatwa sebagai instrumen diskursif untuk meneguhkan legitimasi primordialnya dalam menentukan wacana keagamaan publik (Umam, 2015). Melalui fatwa dan otoritas yang dimiliki, MUI menumbuhkan diskursus-diskus baru yakni keberagaman arus utama sekaligus menguatkan klaim kekuasaan para ulama. Segala bentuk wacana yang berada di luar cakupan wacana dominan dianggap sebagai sesuatu yang “liyan”. MUI berhasil membangun dan mengendalikan diskursus keberagaman publik terutama dalam fatwa-fatwa mengenai paham keagamaan. Dalam konteks ini wacana sesat-menyesatkan menjadi wacana dominan atau arus utama.

4. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pembentukan Wacana Islam pada Masa Orde Baru dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XII

Belajar sejarah mendorong peserta didik mampu berpikir kritis dan mampu mengkaji perubahan di lingkungannya serta mempunyai kesadaran akan perubahan-perubahan dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah. Selain itu belajar sejarah dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang masa lalu, masa sekarang dan relasinya dengan masa depan. Mempelajari sejarah tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan pemahaman tentang nilai, fungsi dan manfaat yang terkandung dari tiap peristiwa.

Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran sejarah dikelompokkan menjadi dua yakni mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Sejarah sebagai mata pelajaran wajib berlabel Sejarah Indonesia sedangkan dalam peminatan, sejarah dimasukkan dalam peminatan sosial yang serumpun

dengan ekonomi, sosiologi, antropologi dan geografi. Dalam kompetensi inti yang dalam rancangan kurikulum 2013, tujuan mata pelajaran sejarah ialah mengembangka penghayatan terhadap ajaran agama, mengembangkan perilaku positif, mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan (sejarah) untuk menghadapi peristiwa aktual dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari sejarah). Dalam kompetensi inti yang dalam rancangan kurikulum 2013, tujuan mata pelajaran sejarah ialah: mengembangkan penghayatan terhadap ajaran agama, mengembangkan perilaku positif, mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan (sejarah) untuk menghadapi peristiwa actual, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari (sejarah). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif.

Pada jenjang SMA IPS, sejarah Orde Baru Masuk diajarkan pada kelas XII dengan kompetensi dasar rerekonstruksi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Sejarah MUI dalam kaitannya dengan perannya dalam pembentukan wacana keislaman mendapat relevansinya dalam kompetensi dasar ini. Pada sub bab sebelumnya telah dibahas bahwa faktor-faktor sosial budaya dan politik banyak mempengaruhi penetapan fatwa MUI dan melalui fatwa dan otoritas yang dimiliki, MUI menumbuhkan diskursus-diskurus baru yakni keberagaman arus utama sebagai instrumen diskursif untuk meneguhkan legitimasi primodialnya dalam menentukan wacana keagamaan publik terutama pada fatwa-fatwa tentang paham keagamaan. Fatwa tersebut membuahakan pandangan keagamaan yang eksklusif dan cenderung intoleran pada aktualisasinya.

Substansi mengenai fatwa MUI tentang paham keagaman menjadi pembelajaran yang berharga terutama pada kurun waktu belakangan ketika politik identitas ramai digiatkan dan intoleransi menguat di kalangan umat Islam. Diperlukan formulasi baru dalam cara pandang untuk menjalin

hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Pluralisme agama menyediakan cara pandang dan kerangka untuk mengatur hubungan di antara komunitas yang berbeda (An Naim, 2007). Sikap ini dinilai lebih menjanjikan karena orientasinya pada penerimaan pada keragaman sebagai nilai yang positif dan terus berusaha memfasilitasi negosiasi dan penyesuaian di antara mereka. Pada level ini individu-individu dituntut untuk selalu terlibat aktif membangun kebersamaan lewat pemahaman yang konstruktif untuk membentuk suatu kesepakatan (Umam, 2015).

Abdulaziz Sachedina (2004) memandang bahwa pluralisme agama adalah suatu keniscayaan yang memiliki pedoman etik yang digali dari nilai-nilai agama. *Pertama*, memandang manusia sebagai satu umat. *Kedua*, landasan etik untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. *Ketiga*, pengampunan (pemaafan) umat manusia sebagai kerangka resolusi konflik.

Pada tataran praktik, dialog terbuka yang sifatnya konstruktif baik pada kalangan umat Islam sendiri maupun dialog antar umat perlu dibiasakan (Umam). Dialog merupakan sebuah langkah progresif untuk saling mengenal sekaligus sebuah langkah preventif untuk mengurangi kerawanan sosial yang ditimbulkan karena perbedaan.

SIMPULAN

MUI dibentuk oleh pemerintah Orde Baru untuk meredam pertentangan kelompok dan menciptakan harmoni dan kerjasama dalam hubungan antara umat Islam dan negara. Melalui fatwa dan otoritas yang dimiliki, MUI menumbuhkan diskursus-diskus baru yakni keberagaman arus utama. Terdapat relevansi peran Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan wacana keislaman pada masa Orde Baru 1975-1998 dalam membentuk cara pandang untuk menjalin hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk melalui pembelajaran sejarah di kelas XII IPS

DAFTAR PUSTAKA

- Brackman, Arnold C. 1970. *The Communist Collaps in Indonesia*. Singapore: Asia Pasific Press
- Bruinessen, Martin van. 2013. *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik*. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: Gading
- Cribb, Robert. 2004. *Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa
- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Terj. Th. Sumarthana. Jakarta: Sinar Harapan
- Elson, Robert. 2005. *Suharto: Sebuah Biografi Politik*. Terj. Satrio Wahono. Jakarta: Pustaka Minda utama
- Hamka, Rusydi. 1981. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hefner, Robert W. 2001. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Terj. Ahmad Baso. Jakarta: ISAI
- Karim, Helmi. 1994. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqa Press
- Langenberg, Michael. 2004. "Gestapu dan Kekuasaan Negara di Indonesia". Dalam Robert Cribb. *Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa
- Latif, Yudi. 2013. *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan dan Kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kencana
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik: Teori belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Jakarta: Gema Insani
- Maarif, Ahmad Syafii. 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES
- Masoed, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES
- Moertopo, Ali. 1973. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS
- Mudzhar, Muhammad A. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS
- Muhaimin, Yahya. 1990. "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia". Dalam Abar, Ahmad Zaini. *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur*. Surakarta: Ramadani
- Mujibburahman. 2006. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relation in Indonesia's New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Moderen Islam di indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Porter, Donald J. 2002. *Managing Islam and Politics in Indonesia*. London: Routledge

- Raillon, Francois. 1985. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Terj. Nasir Tamara. Jakarta: LP3ES
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Terj. Hersri Setiawan. Jakarta: ISSI & Hasta mitra
- Ricklefs, M. C. 2013. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*. Terj. FX. Dono Sunardi. Jakarta: Serambi
- Sachedina, Abdulaziz. 2004. *Beda tapi Setara: Pandangan Islam tentang non Islam*. Jakarta: Serambi
- Sopa. 2013. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI tentang Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetik*. Jakarta: Gaung Persada PessSuprayogo, Imam. 2007. *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN Maliki Press
- Syukur, Abdul. 2012. "Hubungan Masyarakat dan Negara". Dalam Taufik Abdullah. *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi*. Ichtisar Baru van Hoeve
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press
- Umam, Fawaizul. 2015. *Kala Beragama tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dan Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Prenada